

FPII

Evaluasi Pembinaan Anak Binaan, LPKA Klas I Kutoarjo Gelar Sidang TPP

Dedy Winarto - KUTOARJO.FPII.OR.ID

Oct 31, 2023 - 10:11



Evaluasi Program Pembinaan Anak, LPKA Kutoarjo Gelar Sidang TPP

KUTOARJO _ Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Kutoarjo dibawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah menggelar Sidang Tim Pengamat Masyarakat (TPM), Senin (30/10/2023). Sidang TPM dihadiri oleh seluruh Tim inti TPM meliputi Kepala Seksi Registrasi dan Klasifikasi, Taufik Nugroho, Kepala Seksi Perawatan Ahmad Baihaqi, Kepala Sub Seksi Registrasi Wagiman, Kepala Sub Seksi Penilaian dan Pengklasifikasian Warjito, Kepala Sub Seksi Administrasi Pengawasan dan Penegakkan Disiplin Puguh Adi Sulistiyo, Undangan Kasubag Umum

Suharyanto, ketua PKBM Tunas Mekar Aman, MT Pangarso serta pelaksana sub Seksi Bimkemas & PA sekaligus notulen Udi fajar Kristiawan.

Ketua Sidang TPP sekaligus Kepala Seksi Pembinaan, Tanti Widiyanah mengatakan Sidang dilaksanakan sesuai standar Tim Pengamat Pemasarakatan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2020 dengan tujuan sebagai berikut: 1). memberikans aran mengenai bentuk dan program pembinaan, pengamanan, pembimbingan serta perawatan tahanan; 2). membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan, pengamanan dan pembimbingan serta perawatan tahanan; 3). menerima keluhan dan pengaduan dari Anak Binaan dan ke-4) Hal-hal lain yang dianggap perlu untuk dibahas. Sidang TPP dihadiri oleh seluruh tim inti, undangan PK Bapas Purwokerto dan orang tua Anak Binaan secara virtual, ketua PKBM Tunas Mekar Aman serta Wali Pemasarakatan.

Sekretaris TPP sekaligus Kepala Sub Seksi Bimkemas & PA Dedy Winarto menambahkan, sidang kali ini merupakan sidang rutin ke-24 tahun 2023. Ada 5 agenda pembahasan yang semuanya dilakukan secara mufakat. Meliputi usulan hak integrasi pembebasan bersyarat, penempatan klasifikasi, evaluasi program pendidikan, penempatan kegiatan Anak Binaan melalui Forum kegiatan Anak Binaan (Forkabi), serta kegiatan kesadaran berbangsa dan bernegara.

Sementara itu, Kepala LPKA Kutoarjo, Arif Rahman secara terpisah menyebutkan bahwa TPP pada UPT bertugas memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala UPT Pemasarakatan.(DW)